

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN
TAHUN 2020-2024

Unit Organisasi	:	Inspektorat Jenderal
Tugas	:	Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan;b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja operasional dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perdagangan;e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; danf. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perdagangan.
Program	:	Program Dukungan Manajemen

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih.	1. Persentase Unit Kerja yang memperoleh skor evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal 76	Menghitung persentase jumlah Unit Kerja yang mendapatkan nilai evaluasi diatas 76 dibandingkan berdasarkan hasil evaluasi Itjen dengan jumlah unit kerja yang dievaluasi oleh Itjen.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Itjen dan/atau oleh KemenPANRB
		2. Persentase Unit Kerja yang memperoleh nilai evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi (RB) minimal 74	Menghitung persentase jumlah Unit Kerja yang mendapatkan nilai evaluasi diatas 74 dibandingkan berdasarkan hasil evaluasi Itjen dengan jumlah unit kerja yang dievaluasi oleh Itjen.	Laporan Hasil Evaluasi RB Itjen dan/atau oleh KemenPANRB
		3. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan skor maturitas SPIP minimal level 3	Menghitung persentase jumlah Unit Kerja yang mendapatkan skor maturitas SPIP minimal level 3 berdasarkan hasil penilaian ITJEN dibandingkan dengan jumlah seluruh Unit Kerja yang dinilai Maturitas SPIP oleh Itjen	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP Itjen dan/atau oleh BPKP

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		4. Unit Kerja Pelayanan Publik yang mendapatkan predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"	Menghitung jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)" berdasarkan hasil penilaian Kemenpan dan RB	Hasil Penilaian WBK atau WBBM oleh KemenPANRB
2.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Internal	1. Persentase batas maksimal temuan kerugian negara dari total anggaran atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK)	Menghitung Persentase temuan kerugian negara berdasarkan LHP yang diterbitkan BPK dibandingkan dengan pagu anggaran Kemendag pada tahun yang menjadi objek pemeriksaan BPK	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan yang diterbitkan pada Tahun berjalan
		2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Menghitung Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diterbitkan Inspektur Jenderal	Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		3. Level Kapabilitas APIP (IACM)	Level kapabilitas APIP berdasarkan hasil penilaian <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)	Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2021
Inspektur Jenderal,

DIDID NOORDIATMOKO

Catatan:

Perubahan IKU Inspektorat Jenderal 2020 – 2024 merupakan tindak lanjut atas hasil reuiu internal Tim Inspektorat Jenderal.